



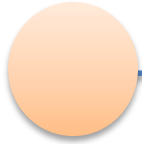
PERKUMPULAN GITA BUANA DENGAN DUKUNGAN CLINTON CARBON INITIATIVE

LAPORAN FINAL SOSIALISASI REDD+ INISIATIF KARBON BERBAK DI PROVINSI JAMBI



Erwin A Perbatakusuma, Rennaldi dan Mulya Shakti

KERJASAMA :
PERKUMPULAN GITA BUANA (PGB)
CLINTON CLIMATE INITIATIVE (CCI)
ZOOLOGICAL SOCIETY OF LONDON (ZSL)
Jambi , 2013



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
A. LATAR BELAKANG KEGIATAN.....	4
B. TUJUAN KEGIATAN.....	7
• Tujuan Kegiatan.....	7
• Objektif Kegiatan.....	7
• Hasil Kegiatan.....	7
C. BENTUK DAN METODE KPELAKSANAAN KEGIATAN.....	9
• Bentuk Kegiatan.....	9
• Metode Kegiatan.....	9
• Skematik Kegiatan	9
D. PESERTA KEGIATAN.....	10
E. GAMBARAN UMUM LOKASI.....	11
F. KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT.....	14
G. PROSES KEGIATAN DI TINGKAT KECAMATAN.....	16
• Cluster.1 Kecamatan Kumpeh.....	16
• Cluster.2 Kecamatan Kumpeh.....	16
• Cluster. 3 Kecamatan Berbak.....	17
• Cluster.4 Kecamatan Nipah Panjang.....	17
• Cluster.5 Kecamatan Sadu.....	18
• Cluster.6 Kecamatan Sadu.....	19
• Materi Sosialisasi REDD+ (FGD/FPIC) ditingkat Kecamatan.....	19

•	Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi REDD+ (FGD/FPIC) tingkat Kecamatan.....	20
H.	PROSES KEGIATAN DI TINGKAT KABUPATEN.....	21
•	Sosialisasi REDD+ Tingkat Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur....	21
•	Materi Sosialisasi REDD+ Tingkat Kabupaten.....	22
•	Bentuk Kegiatan Sosialisasi REDD+ Tingkat Kabupaten.....	23
•	Narasumber kegiatan Sosialisasi Tingkat Kabupaten.....	24
•	Catatan penting hasil kegiatan Sosialisasi REDD+ Tingkat Kabupaten.....	25
•	Rumusan hasil Kegiatan Sosialisasi REDD+ Tingkat Kabupaten.....	27
I.	PROSES LOKAKARYA REDD+ TINGKAT PROVINSI JAMBI.....	31
•	Materi Kegiatan Lokakarya REDD+ Tingkat Provinsi	32
•	Bentuk kegiatan Lokakarya REDD+ Tingkat Provinsi.....	33
J.	SINTESA AKHIR KEGIATAN LOKAKARYA REDD+ TINGKAT PROVINSI.....	38
•	Latar Belakang	38
•	Langkah Strategis Dalam Menyelamatkan Kawasan Ekosistem Berbak.....	39
K.	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	41
•	Kesimpulan.....	41
•	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Kegiatan.....	43
L.	PENUTUP.....	45



PROGRES KEGIATAN SOSIALISASI REDD+ DI KABUPATEN

A LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan hutan tropis terluas ketiga di dunia. Pemanfaatan sumber daya hutan di Indonesia mengikuti aturan keempat fungsi/kategori hutan. Pertama, hutan konservasi, dikelola untuk mengkonservasi keanekaragaman biologi, sumber daya genetik yang diperlukan untuk bahan pangan, tanaman obat, domestikasi jenis kayu hutan dan non kayu. Kedua, hutan lindung, penting untuk memelihara fungsi hidrologi, perlindungan DAS dan konservasi tanah. Ketiga, hutan produksi, menyediakan produksi kayu dan non kayu, dan dikelola melalui sistem tebang pilih untuk hutan alam dan tebang habis untuk hutan tanaman. Keempat adalah hutan konversi, suatu kawasan hutan yang dapat dikonversi menjadi area penggunaan lahan lainnya.

Sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation Framework on Climate Change Convention atau UNFCCC) di dalam keputusannya no 11/CP.7, deforestasi didefinisikan sebagai akibat langsung, dari adanya pengaruh manusia yang dilakukan melalui konversi lahan berhutan menjadi lahan yang tidak berhutan. Definisi ini menunjuk pada terjadinya pengurangan penutupan tajuk hutan yang awalnya berada di atas ambang batas dari definisi hutan menjadi di bawah ambang batas tersebut. Degradasi didefinisikan sebagai akibat langsung dari adanya pengaruh manusia yang mengakibatkan hilangnya secara terus menerus dan kehilangan tersebut tidak termasuk ke dalam deforestasi. Degradasi mencerminkan adanya penurunan stok karbon yang sifatnya terukur dan lestari sebagai akibat dari adanya pengaruh manusia dan menyisakan tutupan hutan yang dapat diukur di atas ambang batas minimum dari yang dipersyaratkan dalam definisi hutan. Emisi kasar (*gross emission*) dihitung dari seluruh pohon yang diambil dan terutama biomass serta seluruh karbon yang diemisi. Perhitungan ini tidak memasukkan pengurangan karbon yang tertangkap di dalam vegetasi dari dari penggunaan lahan penggantinya. Sementara itu perhitungan emisi neto (*nett emission*) memasukkan pohon yang diambil serta sebagian besar biomas dan seluruh karbon yang tersimpan. Penghitungan ini memberi ruang untuk memasukkan cadangan karbon di areal deforestasi setelah dilakukannya konversi. Apabila hutan alam digantikan untuk pembangunan hutan tanaman maka akan lebih menarik untuk menerapkan konsep deforestasi netto mengingat tingkat emisi diasumsikan menjadi lebih rendah karena adanya penyerapan karbon yang mengikutinya setelah tanaman hutan tumbuh.

Kehilangan hutan yang tidak direncanakan dapat berasal dari adanya kebakaran, penyerobotan lahan, penebangan yang tidak mengikuti kaedah kelestarian pada kawasan perusahaan hutan,



Photo.1 Kawasan Mangrove Pantai Timur

serta penebangan ilegal yang dilakukan baik pada skala besar maupun kecil. Bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada hutan, tekanan tersebut dikarenakan terbatasnya alternatif yang dapat dimanfaatkan bagi kelompok masyarakat ini. Rendahnya tingkat pendapatan yang diterima mengakibatkan kelompok ini semakin tergantung kepada hasil hutan sebagai sumber matapencahariannya.

Selain hilangnya hutan yang tidak direncanakan, panjangnya batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung mengakibatkan kesulitan dalam hal pengontrolan, akibatnya dapat mengundang gangguan yang tidak direncanakan berasal dari masyarakat setempat ataupun pengguna hutan untuk tujuan komersial serta menjadi

sasaran penebangan liar yang dilakukan skala kecil maupun skala besar. Lemahnya penegakan hukum yang terutama terjadi di hutan lindung disebut sebagai salah satu faktor yang menentukan terjadinya penebangan liar dan gangguan penyerobotan lahan. Disamping itu, faktor lain yang termasuk di dalamnya adalah kurangnya atau minimnya insentif bagi masyarakat dan pemerintah untuk mempertahankan hutan lindung, serta rendahnya kapasitas institusi yang menangani pengelolaan kawasan ini setelah desentralisasi yang dilakukan kepada pemerintah daerah. Umumnya gangguan penyerobotan tersebut dilakukan oleh masyarakat tetangga yang tidak menyadari adanya batas hutan di lapangan

Pada dekade terakhir ini kehutanan menghadapi tantangan yang menuntut dilakukannya pemfokusan kembali dan reorientasi dari berbagai kebijakan. Sehubungan dengan itu, sektor kehutanan telah menetapkan lima kebijakan pokok, sebagai berikut (1) pemberantasan penebangan liar serta perdagangan ilegal; (2) restrukturisasi sektor kehutanan melalui penguatan hutan tanaman dan restrukturisasi industri; (3) rehabilitasi dan konservasi hutan; (4) penguatan ekonomi masyarakat lokal di sekitar hutan; (5) pemantapan kawasan hutan. Kelima kebijakan prioritas tersebut telah diterjemahkan ke dalam perencanaan kehutanan yang disusun untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Kerangka peraturan perundangan dan kebijakan kehutanan yang telah ada berkontribusi sebagai kondisi pemungkin dilakukannya aksi mitigasi perubahan iklim, Termasuk ke dalam aksi tersebut

adalah kegiatan pengurangan emisi yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan, pengelolaan hutan lestari, konservasi hutan, serta kegiatan penguatan stok cadangan karbon yang berasal dari restorasi hutan, afforestasi dan reforestasi.

Deforestasi menjadi topic utama di dalam berbagai forum diskusi yang membahas isu perubahan iklim yang berkaitan dengan sector kehutanan, khususnya setelah dipublikasikannya laporan Stern mengenai ekonomi perubahan iklim dan kampanye yang dilakukan Stern ke seluruh stakeholder termasuk pembuat kebijakan. Stern menekankan pada deforestasi di Negara berkembang yang dianggap berkontribusi secara nyata terhadap emisi gas rumah kaca global dan mengalami kecenderungan akan terus bertambah kecuali adanya intervensi kebijakan untuk mengatasi hal tersebut. Berdasarkan pada data WRI (Stern, 2006), deforestasi berkontribusi sebesar kurang lebih 18% dari emisi global dan dari jumlah tersebut 75%nya berasal dari Negara berkembang. Dalam laporan dan kampanyenya, Stern meminta tindakan cepat untuk mengurangi emisi dari sector ini dan menekankan pada pentingnya partisipasi masyarakat internasional untuk membantu negara berkembang dalam mengurangi deforestasi

Isu deforestasi muncul dibawah agenda “ Pengurangan Emisi dari Deforestasi di Negara Berkembang (RED)” pada saat konferensi UNFCCC ke 11 (COP ke 11) di Montreal tahun 2005 dan telah direspon secara positif oleh banyak Negara. Dalam berbagai forum termasuk COP/SB, banyak pihak memandang bahwa skema RED seharusnya melibatkan partisipasi dari semua Negara. Tantangan terbesar adalah bagaimana perbedaan kondisi nasional pada masing-masing Negara diakomodasi secara adil dan proposional dengan mempertimbangkan pendekatan pemecahan isu kehutanan dibawah konvensi iklim.

Diskusi politik antar negara (internasional) dalam mengatasi masalah ini, ada pihak *penghasil emisi* dan pihak *penyerap emisi*. Negara-negara *penyerap karbon* yaitu pemilik hutan yang kebanyakan merupakan negara-negara berkembang akan berusaha mencoba menjaga lahannya, dan sebagai kompensasinya negara penghasil emisi yang umumnya negara-negara industri akan membayar apa yang telah mereka keluarkan. Yang menjadi masalahnya yaitu bagaimana menghargai nilai karbon itu. Inilah ide dibalik skema REDD (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*). Dimana hutan tropis menutupi sekitar 15% permukaan darat bumi, dan mengandung sekitar 25% carbon dalam biosfir daratan. Saat ini hutan-hutan tersebut semakin berkurang luasannya dimana sekitar 13 juta hektar/tahun dialihfungsikan menjadi peruntukkan lain. Akibatnya meningkatkan emisi gas-gas penyebab efek rumah kaca di atmosfer terutama karbon. IPCC memperkirakan emisi karbon dari deforestasi hutan tropis pada tahun 1990-an yaitu 1,6 miliar ton karbon per tahun sebanding 20% dari emisi karbon secara global.

Sekarang ini isu REDD telah menjadi isu besar secara internasional. Asumsi dasarnya sederhana yaitu dengan mempertahankan hutan dari deforestasi dan degradasi maka iklim bumi akan bisa dikendalikan. Walaupun asumsinya sederhana namun masalahnya sangat kompleks. Dalam

kompleksitas masalah ini hal terpenting yang cenderung luput dari untuk mendapat perhatian adalah mulai dari kawasan lahan basah di Pantai Timur sampai hutan hujan tropis dataran tinggi di sekitar Bukit Barisan. Kebanyakan dari Pemerintah Provinsi di kawasan ini telah melakukan MoU dengan para Makelar Carbon untuk skema perdagangan carbon. Sementara pada sisi lain banyak **pihak didaerah belum memahami secara mendetail bagaimana skemanya, kebijakan, dan keputusan mulai dari tingkat Tapak , Daerah, Nasional serta Internasional terkait dengan perubahan Iklim dalam skema REDD.**

Jambi mempunyai potensi penerapan REDD+ yang tinggi, karena didasari kuatnya nilai-nilai konservasi karbon di hutan gambut, masih luasnya kawasan hutan alam dengan nilai biodiversitas yang tinggi misalnya dengan keberadaan Taman Nasional Berbak, ancaman deforestasi yang tinggi serta masih banyaknya masyarakat miskin dan masyarakat tertinggal di sekitar kawasan hutan.

Pemerintah Provinsi Jambi telah membentuk Komisi Daerah REDD+ Provinsi Jambi melalui Keputusan Gubernur Jambi No. 356/Kep.Gub/EkBang&SDA /2011 untuk melaksanakan kegiatan persiapan REDD+. Disisi lain, investasi riset dan pengembangan kegiatan lokasi percontohan menuju kesiapan implementasi REDD+ di Provinsi Jambi telah dilakukan oleh berbagai pihak, diantaranya Zoological Society of London bersama Balai Taman Nasional Berbak. Selain itu Provinsi Jambi terpilih sebagai salah satu provinsi kandidat di Indonesia untuk dijadikan lokasi percontohan REDD+. Provinsi ini juga menjadi salah satu target penurunan emisi GRK Nasional dengan ditetapkannya sebagai salah satu dari 2 lokasi di Indonesia untuk lokasi percontohan (*demonstration activities*) penerapan REDD+ di kawasan konservasi hutan gambut dalam kerangka Peraturan Presiden No.61 Tahun 2011.

Oleh karena itu, Perkumpulan Gita Buana akan melakukan komunikasi dan konsultasi kampung, Konsultasi Kabupaten dan Konsultasi Provinsi untuk menggali aspirasi masyarakat di wilayah bentang alam ekosistem Berbak terkait pengembangan kegiatan lokasi percontohan menuju kesiapan implementasi REDD+ di Provinsi Jambi telah dilakukan oleh Zoological Society of London bersama Balai Taman Nasional Berbak Konsultasi ini diharapkan akan mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat di daerah terutama masyarakat di dalam dan sekitar hutan khususnya Taman Nasional Berbak.



Tujuan Kegiatan Sosialisasi REDD+ (Inisiatif Karbon Berbak) antara lain : 1. Untuk membangun Komunikasi dan kepercayaan masyarakat lokal dan pemerintah daerah terkait Proyek Inisiatif Karbon Berbak; 2. Untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan lokal dalam memahami dan menyikapi isu REDD+, khususnya bagi pemerintah daerah (desa, kabupaten dan provinsi) serta masyarakat yang berada di sekitar lokasi yang diusulkan sebagai lokasi Proyek REDD+; dan 3. Untuk mempertemukan para pemangku kepentingan lokal untuk belajar dan memberikan masukan serta persetujuan pada Program REDD+ yang diusulkan baik oleh pengembang Proyek REDD+ maupun usulan rencana –rencana kegiatan REDD+ dari masyarakat lokal;

Objektif Kegiatan Sosialisasi REDD+ (Inisiatif Karbon Berbak) antara lain : 1. Mendisimulasi informasi mengenai isu perubahan iklim, REDD+ dan PADIATAPA; 2. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan peluang, tantangan dan kebutuhan pemangku kepentingan lokal terkait REDD+; 3. Terbaginya informasi dan petikan hikmah pembelajaran kegiatan mitigasi perubahan iklim yang sedang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Berbak dan ZSL Indonesia kepada pemangku kepentingan Lokal; dan 4. Mengembangkan rencana tindak lanjut kegiatan bagi masyarakat lokal yang berada di lokasi REDD+ yang diusulkan;

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Sosialisasi REDD+ (Inisiatif Karbon Berbak) antara lain : 1. Melaksanakan 6 (enam) serial diskusi kelompok Tefokus (Fokus Group Discussion) yang melibatkan perwakilan 32 desa meliputi 4 (empat) kecamatan di sekitar lokasi Proyek REDD+ yang diusulkan; 2. Melaksanakan 2 (dua) serial konsultasi publik tingkat kabupaten di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan 3. Melaksanakan 1 (satu) serial kegiatan Lokakarya tingkat Provinsi di Ibu Kota Provinsi Jambi.

Hasil Kegiatan yang Diharapkan Sosialisasi REDD+ (Inisiatif Karbon Berbak) antara lain : 1. Para pihak di daerah mendapatkan informasi dan gambaran situasi internasional dan nasional tentang perubahan iklim dan Skema REDD+. 2. Terkumpulnya aspirasi di daerah tentang perubahan iklim dan Skema REDD+. 3. Teridentifikasinya peluang, hambatan dan kebutuhan untuk implementasi REDD berdasarkan kondisi nyata di lapangan dan yang ke 4. Adalah Terbangunnya kesamaan pemahaman para pihak di daerah dalam merespon perkembangan skema REDD+ kedepan.

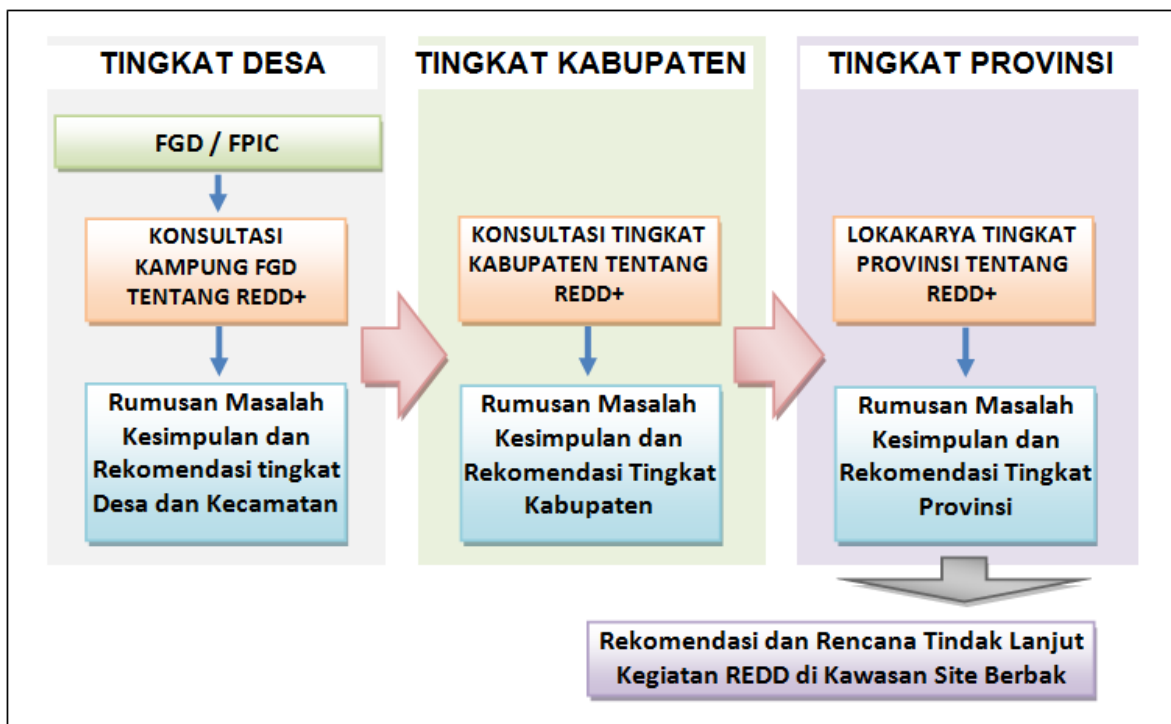
C

BENTUK DAN METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Bentuk Kegiatan Sosialisasi REDD+ (Inisiatif Karbon Berbak) antara lain adalah melakukan ; 1. Serangkaian Konsultasi Kampung melalui FGD/FPIC di 32 desa Terdiri dari 6 cluster, pada 4 Kecamatan dan 2 (dua) Kabupaten. 2. Dilanjutkan dengan Kegiatan Sosialisasi REDD+ (Inisiatif Karbon Berbak) menggunakan metode FGD-FPIC di dua Kabupaten yaitu Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan yang ke Tiga diakhiri dengan Lokakarya Tingkat Provinsi Jambi sebagai final dari rangkaian kegiatan Sosialisasi Implementasi kegiatan dengan skema REDD+.

Metode kegiatan Sosialisasi REDD+ (Inisiatif Karbon Berbak) antara lain adalah : 1. Presentase dari Narasumber dan Diskusi Panel, 2. Fasilitasi Pembahasan oleh Fasilitator/Moderator dan 3. Rumusan konsultasi Publik dalam bentuk sintesa kegiatan Sosialisasi / Lokakarya yang dilaksanakan.

Secara skematik bentuk pelaksanaan kegiatan Sosialisasi REDD+ (Inisiatif Karbon Berbak) melalui FGD – FPIC dilaksanakan sebagai berikut :



D

PESERTA KEGIATAN

Peserta yang dilibatkan dalam Sosialisasi ini merupakan perwakilan dari para pihak yang terkait langsung dengan keberadaan Kawasan Ekosistem Berbak, yaitu:

NO	PESERTA (LEMBAGA/INSTANSI)	KETERANGAN
1	Perwakilan masyarakat di 6 cluster atau 32 desa.	Peserta
2	Perwakilan 4 Kecamatan	Narasumber
3	Balai Taman Nasional Berbak	Narasumber
4	Zoological society of London	Narasumber
5	Perkumpulan Gita Buana	Narasumber
6	KKI-WARSI	Narasumber
7	Komda REDD+ Jambi	Narasumber
8	Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten dan Propinsi Jambi	Peserta
9	Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten dan Propinsi Jambi	Narasumber
10	Bappeda Kabupaten dan Provinsi Jambi	Narasumber
11	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanjabtim	Narasumber
12	Biro Sumber Daya Alam (SDA) Pemda Propinsi Jambi	Peserta
13	Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Provinsi Jambi.	Peserta
14	PT.Putra Duta Indahwood dan PT. Pesona Rimba Persada.	Narasumber



Photo.3 Kegiatan Sosialisasi REDD+ di Kabupaten Tanjabtim
Tgl, 1 Juli 2013



Photo.4 Kegiatan Sosialisasi REDD+ di Kabupaten Muaro Jambi
Tgl, 24 Juni 2013

E**GAMBARAN UMUM LOKASI**

Wilayah Taman Nasional Berbak berada di dua Kabupaten yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Taman Nasional Berbak ini memiliki ekosistem yang masih asli yang dijadikan sebagai tempat penelitian, pendidikan, Agronomi, dan wisata, karena memiliki nilai yang tinggi dan menarik, baik flora maupun faunanya. Menurut Rencana Pengelola daerah penyangga Taman Nasional Berbak, Daerah penyangga Taman Nasional Berbak ditetapkan berada diluar tata batas Taman Nasional. Daerah Penyagga TNB ini meliputi kawasan hutan, lahan pertanian dan perkebunan masyarakat, tanah desa, kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan taman hutan raya, kawasan hutan lindung gambut, kawasan hutan produksi terbatas di sekitar Taman Nasional Berbak serta daerah laut pantai timur yang berdekatan dengan Taman Nasional Berbak selebar 2 km dari pantai. Luas total daerah penyangga Taman Nasional Berbak adalah ± 236.000 ha.



Photo.5 Kondisi Sungai di wilayah Kecamatan Sadu sebagai sarana Transportasi masyarakat

Taman Nasional Berbak adalah salah satu blok ekosistem rawa gambut yang luas, relatif utuh dan menjadi perwakilan tipe hutan rawa gambut yang masih tersisa di pantai timur Pulau Sumatera. Kandungan hutan gambut di Taman Nasional Berbak seluas 162.000 hektar merupakan 2,3 % dari luas hutan gambut di Pulau

Sumatera atau 23% dari luas hutan gambut yang masih tersisa di Provinsi Jambi yang memiliki luas 716.000 hektar.

Hutan gambut di Taman Nasional Berbak, selain memiliki nilai layanan jasa lingkungan sebagai reservoir karbon, kawasan ini juga menjadi reservoir biodiversitas fauna dan flora. Kawasan ini adalah kawasan perlindungan yang penting bagi keanekaragaman hayati fauna dan flora di ekosistem lahan basah, khususnya harimau Sumatera dan jenis-jenis burung migran, endemik dan terancam punah secara global. Sejak tahun 1992, TN.Berbak telah terdaftar sebagai salah satu situs Konvensi Ramsar di dunia dan tertua di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan TN.Berbak tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Harimau, Taman Nasional

Berbak juga telah ditetapkan sebagai salah satu wilayah prioritas “Bentang Alam Konservasi Harimau” (tiger conservation landscape) di Sumatera.

Hutan gambut di TN. Berbak, selain memainkan peranan penting sebagai gudang simpanan karbon dan pengatur tata-air di kabupaten-kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur. Hutan rawa gambut juga menjadi tumpuan masyarakat setempat, karena memberikan nilai sosial ekonomi-ekologis bagi peningkatan sumber penghidupan masyarakat setempat. Hutan gambut menjadi sistem pendukung ekologis yang digunakan berbagai jenis ikan sebagai lokasi pemijahan, pendewasaan dan sumber pakan ikan. Pemanfaatan sumber daya ikan dari hutan rawa gambut menjadi sumber penting protein hewani bagi masyarakat lokal dan menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat dari sektor perikanan laut.

Lahan hutan gambut alami juga berperan signifikan secara hidrologis, yaitu pencegah terjadinya intrusi air laut atau penggaraman air, pengatur fluktuasi air, sistem kontrol air, pencegah kekeringan, pencegah banjir, dan menjaga keseimbangan air regional melalui fungsinya sebagai reservoir dan daerah tangkapan air yang mempunyai kapasitas menyimpan air yang besar. Dari

total volume hutan gambut, 80% - 90% diantaranya merupakan penampung air pada musim hujan dan melepaskan air secara bertahap pada musim kemarau. Dan apabila hutan rawa gambut dikonversi, karbon yang tersimpan di dalamnya mengalami oksidasi, sehingga melepaskan emisi karbon sebagai salah satu sumber emisi terpenting Gas Rumah Kaca. Emisi karbon dari tanah gambut telah dianggap masalah global, karena jumlahnya dapat mencapai 2 – 3 kali lipat dari emisi karbon yang bersumber dari tanah mineral.

Selain itu, perhatian akan arti pentingnya pengelolaan ekosistem kawasan Berbak melalui pengelolaan Daerah Aliran Sungai – DAS (water catchment management), merupakan hal penting yang harus segera dilakukan. Misalnya, adanya sungai Air Hitam Laut (AHL) yang melintasi jantung TN Berbak. Sungai ini berair hitam karena hutan gambutnya yang dalam (2-10 meter) dan berhulu di daerah Jambi dan Sumatera Selatan bagian Utara (berbatasan dengan Jambi). Rusaknya sistem tata air (hidrologi) dari DAS Air Hitam Laut, akibat adanya penebangan hutan di bagian hulunya, akan menyebabkan TN Berbak menjadi rentan terhadap kebakaran dan perusakan Gambut dimana pada bagian hulu sungai AHL ini (di bagian Muaro Jambi) terdapat hutan Produksi Terbatas (25.144 ha) dan hutan Lindung Gambut (19.911 ha). Ironisnya pada kedua wilayah ini terdapat pula dua perusahaan pemegang konsesi HPH, yaitu PT. Putra Duta Indah Wood dan PT. Rimba Karya Indah (sudah tidak beroperasi akibat habisnya kayu)

Daerah penyangga tersebut perlu dikembangkan dan dikelola guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah penyangga sehingga dapat meningkatkan upaya pelestarian Taman Nasional Berbak. Pengembangan daerah ini memerlukan perencanaan terpadu dan dapat

F**KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT**

Photo.6 Kondisi Perkampungan Masyarakat di desa Air Hitam Laut

Secara ringkas dinyatakan pada tataran kabupaten, kondisi struktur sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menempatkan sektor pertanian sebagai pembentuk sektor-sektor perekonomian di kedua kabupaten .

Interaksi masyarakat lokal dengan keberadaan Taman Nasional Berbak diketahui sangat kuat. Ada 32 desa yang bersinggungan langsung dengan Kawasan Taman Nasional. Desa-desanya tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kluster, yaitu tipe-tipe desa pantai, desa sungai dan desa daratan. Masyarakat pedesaan masih tergantung pemanfaatan sumber daya alam untuk kelangsungan hidupnya, seperti sungai, perairan laut dan hutan. Desa-desanya tersebut terbentuk secara mandiri oleh kelompok-kelompok pendatang sejak jaman pendudukan pemerintah Hindia Belanda. Desa-desanya sekitar TN. Berbak mempunyai heterogenitas etnis yang tinggi yang meliputi suku-suku Bugis, Banjar, Melayu Jambi dan Melayu Palembang, Jawa, Batak, dan Minangkabau. Keanekaragaman etnis ini menunjukkan pula tingkat kohesi sosial yang rendah.

Umumnya masyarakat berprofesi sebagai petani kelapa dan karet yang merupakan mata pencaharian yang sangat diandalkan. Disamping itu profesi sebagai pegawai, baik negeri atau swasta. Meski begitu, ada juga yang bergerak di bidang peternakan, perdagangan, menjadi buruh tani ataupun nelayan. Petani karet mampu menghasilkan pendapatan kotor sebesar Rp. 2.400.000 – 3.600.000 perbulan, sedangkan sebagai buruh sadap karet memperoleh pendapatan kotor Rp. 1.200.000 – Rp. 1.800.000 perbulan. Sedangkan sebagai profesi nelayan pada bulan – bulan penangkapan ikan dapat menghasilkan pendapatan Rp. 50.000 – Rp. 70.000 perhari.

Pemanfaatan ruang di daratan didominasi oleh persawahan, perkebunan/kebun kelapa, semak belukar dan hutan. Struktur penguasaan lahan secara umum terdiri dari penguasaan individual dan tidak ada bentuk penguasaan lahan secara kolektif. Adanya ketidakjelasan tata batas kawasan hutan yang ada di sekitar desa mereka di tingkat lapangan menjadikan ketidakpastian bagi masyarakat untuk melakukan pengelolaan sumberdaya lahan dan usaha ekonomi. Kondisi ini pada akhirnya berdampak pada luasnya lahan tidur yang menjadi semak belukar dan meningkatnya konflik tenurial.



Photo.7 Potret Kehidupan masyarakat di Kelurahan Nipah Panjang

Untuk menunjang pelayanan kesehatan bagi warga, desa-desa sekitar TN. Berbak hanya dilengkapi satu unit bangunan pusat kesehatan masyarakat pembantu, dengan dilayani satu orang tenaga medis yang berprofesi sebagai bidan desa dan hanya dilayani satu orang dokter di Desa Air Hitam Laut. Fasilitas kesehatan ini belum sepenuhnya dapat memberikan layanan kesehatan bagi warga, apabila

mengalami gangguan kesehatan yang tidak mampu dilayani di desa dan biasanya warga langsung berobat ke Kota Jambi. Di samping memanfaatkan layanan medis, sebagian warga juga masih memanfaatkan

Secara umum kondisi pendidikan terhadap anak warga desa umumnya dinyatakan rendah karena jauhnya jarak untuk menjangkau jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga dibutuhkan biaya yang tinggi pula serta keadaan ekonomi/tingkat kesejahteraan warga yang dirasa rata-rata rendah, sehingga dianggap tidak mampu untuk menyekolahkan anak sampai pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi setelah menempuh jenjang pendidikan dasar. Di desa-desa sekitar TN. Berbak umumnya hanya memiliki satu unit Sekolah Dasar, kecuali di Desa Air Hitam Laut memiliki 2 unit Sekolah Dasar dan sarana penerangan masyarakat pada umumnya menggunakan fasilitas listrik pedesaan melalui Pembangkit Tenaga Listrik Diesel dan hanya mampu diadakan pada malam hari dan bagi rumah tangga. Sedangkan keluarga yang mampu mengadakan jenset penghasil listrik bertenaga bensin.

Umumnya di desa-desa sekitar TN. Berbak masih banyak golongan tidak mampu secara ekonomi. Adapun indikator-indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan di tingkat lokal adalah terkait dengan beberapa indikator seperti kepemilikan kebun, kepemilikan kapal bertenaga mesin, jenis usaha yang dikelola, kepemilikan perhiasan emas, dan kemampuan menyekolahkan anak. Golongan tidak mampu secara ekonomi ditunjukkan dengan indikator-indikator: warga yang berprofesi sebagai buruh tani dan nelayan biasa, memiliki kendaraan air (perahu), rumah atap dengan rangka kayu bulat, tidak punya penghasilan tetap, berprofesi nelayan dan tidak memiliki kendaraan bermotor.



Photo.8 Potret Pemukiman Petani Nelayan di Kelurahan Nipah Panjang

Sosialisasi REDD+ ditingkat desa dan Kecamatan

1. FGD/FPIC Custer I. Kecamatan Kumpeh. Tanggal, 27 Maret 2013 di Aula Kantor Camat Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi dan di buka langsung oleh Camat Kumpeh Syaifullah, S.Ag. Peserta yang diundang dalam kegiatan Sosialisasi Ini merupakan perwakilan masyarakat dan pemerintah desa sebanyak 8 orang perdesa yang terdiri dari Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh



Photo.9 Pembukaan Kegiatan FGD/FPIC di Cluster 1 Kec. Kumpeh oleh Camat Kumpeh Syaifullah, S.Ag di Aula Kantor Camat Kumpeh.

perempuan dan masyarakat Petani yang ada di masing-masing Desa. Dengan jumlah Peserta sebanyak 55 orang peserta, terdiri dari **16 Kaum perempuan dan 39 Orang Laki-laki** yang mewakili 5 desa Kecamatan Kumpeh yaitu: Desa Pematang Raman, Desa Puding, Desa Sponjen, Desa Sungai Bungur dan desa Desa Petanang dengan Narasumber : **Erwin Perbatakusuma** dari ZSL, **Ujang Holisudin** dari Balai Taman Nasional Berbak, **Emmi Primadona** dari WARSI Jambi, **Rennaldi** dari Perkumpulan Gita Buana serta Moderator Hambali dari Mitra Kasi Poundation Jambi.

2. FGD/FPIC Custer II. Kecamatan Kumpeh. Tanggal, 8 April 2013 di Aula Kantor Camat Kumpeh. Kabupaten Muaro Jambi dan di buka langsung oleh Sekretaris Camat Kumpeh Supri Hardi, SE. Peserta yang diundang dalam kegiatan Sosialisasi Ini merupakan perwakilan masyarakat dan pemerintah desa sebanyak 8 orang perdesa yang terdiri dari



Photo.10 Pembukaan Kegiatan FGD/FPIC di Cluster II Kec. Kumpeh oleh Sekretaris Camat Kumpeh Supri Hardi, SE di Aula Kantor Camat Kumpeh.

Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh perempuan dan masyarakat Petani yang ada di masing-masing Desa. Dengan jumlah Peserta sebanyak 66 orang peserta, terdiri dari 11 orang Kaum perempuan dan 55 orang Laki-laki yang mewakili 6 desa Kecamatan

Kumpeh yaitu: Desa Sogo, Desa Pulau Mentaro, Desa Jebus, Desa Gedong Karya, Desa Sungai Aur, Desa Betung dan Desa Tanjung dengan Narasumber : **Mulya Shakti** dari ZSL, **Ujang Holisudin** dari Balai Taman Nasional Berbak, **Emmi Primadona**



Photo.11 Peserta dan Narasumber kegiatan FGD/FPIC di Cluster II Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.

dari WARSI Jambi, **Rennaldi** dari Perkumpulan Gita Buana serta Moderator **Hambali** dari Mitra Kasi Poundation Jambi.

3. FGD/FPIC Custer III. Kecamatan Berbak. Tanggal, 25 April 2013 di Aula Kantor Camat Berbak

Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kegiatan Sosialisasi REDD+ Inisiatif Berbak di Cluster.3 terselenggara dengan baik dan di buka langsung oleh Kepala Balai Taman Nasional Berbak **Bpk Hayani Suprahman,DVM. MSc.** Peserta yang diundang dalam kegiatan Sosialisasi Ini merupakan perwakilan masyarakat dan pemerintah desa sebanyak 8 orang perdesa yang terdiri dari Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh perempuan dan masyarakat Petani yang ada di masing-masing Desa yang dihadiri oleh 63 orang peserta, terdiri dari 16 orang Kaum perempuan dan 47 orang Laki-laki yang mewakili 7 desa Kecamatan Kumpeh yaitu: Kelurahan Simpang, Desa Rawasari, Desa Rantau Rasau, Desa Sungai Rambut, Desa Telago Limo dan Desa Rantau Makmur, dengan Narasumber : **Mulya Shakti** dari ZSL, **Hayani Suprahman,DVM. MSc** dari Balai Taman Nasional Berbak, **Dodi Kurniawan** Ka. Rayon



Photo.12 Pembukaan Kegiatan FGD/FPIC di Cluster III Kec. Berbak oleh Kepala Balai TN. Berbak Bpk. Hayani Suprahman,DVM, M.Sc di Aula Kantor Camat Berbak

Sungai Ramut Balai Taman Nasional Berbak, **Emmi Primadona** dari WARSI Jambi, **Rennaldi** dari Perkumpulan Gita Buana serta Moderator **Eddi Harvia Surma** dari KKI WARSI Jambi.

4. FGD/FPIC Custer IV. Kecamatan Nipah Panjang. Tanggal, 13 Mei 2013 di Aula Kantor Camat

Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kegiatan Sosialisasi REDD+ Inisiatif Berbak di Cluster.4 di buka langsung oleh Camat Nipah Panjang, **Syafarudin,S.Ip.** Peserta yang



Photo.13 Pembukaan Kegiatan FGD/FPIC di Cluster III Kec. Nipah Panjang oleh Bpk. Syafarudin, S.Ip Camat Nipah Panjang di Aula Kantor Camat. Nipah Panjang

diundang dalam kegiatan Sosialisasi Ini merupakan perwakilan masyarakat dan pemerintah desa sebanyak 3 orang perdesa yang terdiri dari Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh perempuan dan masyarakat Petani yang ada di masing-masing Desa. Kegiatan Sosialisasi dihadiri oleh 40 orang peserta, terdiri dari 12 orang Kaum perempuan dan 28 orang Laki-laki

yang mewakili 3 desa Kecamatan Nipah Panjang yaitu: Desa Sungai Jeruk, Desa Simpang Datuk dan Desa Simpang Jelita. dengan Narasumber **Erwin Perbatakusuma** dari ZSL, **Ujang Holisudin** dari Balai Taman Nasional Berbak, **Emmi Primadona** dari WARSI Jambi, **Rennaldi** dari Perkumpulan Gita Buana serta Moderator **Eddi Harvia Surma** dari KKI WARSI Jambi.

5. **FGD/FPIC Custer V. Kecamatan Sadu. Tanggal, 23 Mei 2013 di Aula Kantor Camat Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.** Kegiatan Sosialisasi REDD+ Inisiatif Berbak di Cluster.5

terselenggara dengan baik dan di buka langsung oleh Sekretaris Camat Sadu Ibu **Desita Aliana, SE, MM.** Peserta yang diundang dalam kegiatan Sosialisasi Ini merupakan perwakilan masyarakat dan pemerintah desa sebanyak 8 orang perdesa yang terdiri dari Perangkat Desa,

Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh perempuan dan masyarakat Petani yang ada di masing-masing Desa. Dan dihadiri oleh 40 orang peserta, terdiri dari 12 orang Kaum perempuan dan 28 orang Laki-laki yang mewakili 3 desa Kecamatan Nipah Panjang yaitu: Desa Sungai Sayang, Sungai Itik, Sungai Jambat dan Desa Remau Baku Tuo, dengan Narasumber **Erwin**



Photo.14 Pembukaan Kegiatan FGD/FPIC di Cluster V Kec. Sadu oleh Sekretaris Camat Sadu Ibu. Desita Aliana, SE, MM di Aula Kantor Camat Sadu.

Perbatakusuma dari ZSL, **Ujang Holisudin** dari Balai Taman Nasional Berbak, **Dodi Kurniawan** Ka. Rayon Sungai Rambut Balai Taman Nasional Berbak, **Emmi Primadona** dari WARSI Jambi, **Rennaldi** dari Perkumpulan Gita Buana serta Moderator **Eddi Harvia Surma** dari KKI WARSI Jambi.

6. **FGD/FPIC Custer VI. Kecamatan Sadu. Tanggal, 5 Juni 2013 di Aula Kantor Kades Air Hitam Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur.** Kegiatan Sosialisasi REDD+ Inisiatif Berbak di Cluster.6 terselenggara dengan baik dan di buka langsung oleh **Kasi Pembangunan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Sadu Bpk. Junaidi.** Peserta yang diundang dalam kegiatan Sosialisasi Ini merupakan perwakilan masyarakat dan pemerintah desa sebanyak 4 orang perdesa yang terdiri dari Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh perempuan dan masyarakat Petani yang ada di masing-masing Desa. Kegiatan Sosialisasi dihadiri oleh 57 orang peserta, terdiri dari 16 orang Kaum perempuan dan 39 orang Laki-laki yang mewakili 4 desa Kecamatan Sadu yaitu: Desa Air Hitam Laut, Desa Pantai Cemara, Desa Labuhan Pering dan Desa Sungai Benuh, dengan Narasumber **Erwin Perbatakusuma** dari ZSL, **Ujang Holisudin** dari Balai Taman Nasional Berbak, **Emmi Primadona** dari WARSJ Jambi, **Rennaldi** dari Perkumpulan Gita Buana serta Moderator **Eddi Harvia Surma** dari KKI WARSJ Jambi.



Photo.15 Pembukaan Kegiatan FGD/FPIC di Cluster VI Kec. Sadu oleh Staff Kecamatan Sadu Bapak Junaidi di Aula Kantor Rasorst Air Hitam Laut Balai Taman Nasional Berbak.

Materi Sosialisasi REDD+ (FGD/FPIC) di Tingkat Kecamatan

Kegiatan Sosialisasi terselenggara berdasarkan agenda acara yang telah di susun dengan presentase Materi sebagai berikut : 40% Pemutaran Filem tentang Perubahan Iklim dan REDD, 25% Pemberian Materi dalam Bentuk Penjelasan dan Gambar, 15% Diskusi Materi yang telah dijelaskan serta 20% Diskusi Kelompok antar peserta dalam menyusun permasalahan dampak dari Mitigasi dan perubahan Iklim serta rencana Tindak lanjut ditingkat Masyarakat.

Dalam penyelenggaraan kegiatan FGD/FPIC, Masing-masing narasumber banyak menjelaskan proses Mitigasi dan Perubahan Iklim yang terjadi dalam bentuk Gambar dan dokumen Photo serta Filem yang berkaitan dengan kerusakan Lingkungan Hidup, serta contoh-contoh perubahan iklim yang sudah terjadi di berbagai tempat dan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan bersama dari fenomena perubahan iklim dan dampak yang telah terjadi di tangan masyarakat dan kemudian dilanjutkan dengan proses diskusi tanya jawab kondisi perubahan iklim dari keadaan masa lalu yang dibandingkan dengan gejala alam yang sering terjadi pada akhir-akhir ini akibat dari perubahan perilaku manusia dalam melakukan proses eksplorasi sumber daya alam baik di dalam desa maupun di kawasan luar desa. Serta

dilanjutkan dengan diskusi kelompok guna melihat sejauh mana pemahaman kegiatan Sosialisasi di tingkat masyarakat.

Materi kegiatan yang disampaikan oleh Narasumber antarlain sebagai berikut ; Balai Taman Nasional Berbak menyampaikan materi terkait peran dan fungsi kawasan Taman Nasional Berbak serta daya dukung terhadap pencegahan proses mitigasi dan perubahan Iklim Global serta rencana kegiatan dan agenda kegiatan yang dilakukan di kawasan Taman Nasional Berbak. Materi oleh ZSL berkaitan dengan Program REDD+ dan Mitigasi perubahan Iklim Global serta dampaknya bagi masyarakat serta Program kerja ZSL di wilayah ekosistem Berbak dan Materi FPIC (Free Prior and Informed an Consent dalam REDD+) disampaikan oleh Warsi selaku lembaga yang telah melaksanakan kegiatan tersebut ditingkat lapangan.

Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi REDD+ (FGD/FPIC) Tingkat Kecamatan



Photo.16 Kepala Balai Taman Nasional Berbak, Ir Handayani Suprahman. Selaku Narasumber kegiatan Sosialisasi REDD+ (FGD/FPIC)



Photo.17 Ujang Holisudin, S/Hut Kasi Perencanaan Kepala Balai Taman Nasional Berbak, Selaku Narasumber kegiatan Sosialisasi REDD+ (FGD/FPIC)



Photo.18 Erwin Perbata Kusuma, Maneger Program ZSL Jambi Narasumber kegiatan Sosialisasi REDD+ (FGD/FPIC)



Photo.19 Mulya Shakti, Ass Maneger Program ZSL Jambi Selaku Narasumber kegiatan Sosialisasi REDD+ (FGD/FPIC)



Photo.20 Emmi Primadona Tan, Divisi Program REDD WARSI- Jambi Narasumber kegiatan Sosialisasi REDD+ (FGD/FPIC)



Photo.21 Eddi Harvia Surma, WARSI-Jambi Selaku Moderator kegiatan Sosialisasi REDD+ (FGD/FPIC)

Sosialisasi REDD+ Tingkat Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur.

Kegiatan Sosialisasi REDD+ di kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan pada tanggal, 1 Juni 2013 bertempat di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Muaro Jambi yang di buka langsung oleh Ketua Bappeda Kabupaten Muaro Jambi **Bpk Abdul Latif** sedangkan untuk kegiatan Sosialisasi REDD+ di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilaksanakan pada tanggal, 24 juni 2013 bertempat di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang di buka Oleh Ketua Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur **Bpk. Mustapa Kamal**. Secara umum sambutan dari ketua Bappeda di dua Kabupaten sangat mendukung pelaksanaan kegiatan Sosialisasi REDD+ dan berharap pada program aplikasi ditingkat lapangan yang menyentuh pada sendi kehidupan dan upaya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya Taman Nasional Berbak dan program penyelamatan lingkungan hidup guna perbaikan daya dukung alam bagi sumber-sumber kehidupan masyarakat saat ini maupun masa yang akan datang. secara uraian sambutan Ketua Bappeda secara umum sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten sangat mendukung kegiatan REDD+ di Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Ada banyak permasalahan yang terjadi di tingkat lapangan berkaitan kegiatan perubahan iklim. Secara umum masyarakat dan Pemeritah Daerah telah memahami dampak-dampak dari perubahan iklim serta penyebab terjadinya ditingkat lapangan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya perbaikan dan penyelenggaraan ditingkat lapangan dalam rangka antisipasi dan pencegahan lebih lanjut.
- c. Dalam proses penyelamatan lingkungan hidup perlu dipertimbangkan antara kebutuhan hajat hidup masyarakat di sekitar hutan dengan pertimbangan pembangunan konservasi kawasan hutan yang ada.



Photo.22 Pembukaan Kegiatan Sosialisasi REDD+ di Kabupaten Muaro Jambi yang dibuka Oleh Ketua Bappeda Kab Muaro Jambi

- d. Diperlukan kompensasi bagi masyarakat disekitar kawasan hutan sebagai imbalan kegiatan pembangunan kehutanan dengan kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat di sekitar hutan.
- e. Pada umumnya Pemerintah Daerah sangat mendukung kegiatan dan program REDD di masing-masing Kabupaten dan dilaksanakan secara terintegrasi dengan multistake holder serta masing-masing unsur pemerintah terkait di Kabupaten.



Photo.23 Pembukaan Kegiatan Sosialisasi REDD+ di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi yang dibuka Oleh Ketua Bappada Kab Muaro Jambi

Materi Sosialisasi REDD+ Tingkat Kabupaten

Sosialisasi REDD+ ditingkat Kabupaten disampaikan oleh narasumber yang terdiri dari Balai Taman Nasional Berbak, ZSL Project, WARSI, Camat Terkait, Komda REDD Provinsi Jambi, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Perusahaan HTI. PT. Putra Duta Indahwood dan PT. Pesona Rimba Belantara yang disampaikan secara Panel di Forum dengan Makalah terkait perencanaan Strategis dari Multistakeholder di Kawasan Ekosistem Berbak menuju skema REDD+ dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi berbagi pengalaman dan permasalahan yang ada ditingkat lapangan guna penyusunan rencana strategis multipihak di kawasan ekosistem Berbak.

Judul / Topik Materi yang disampaikan oleh narasumber dalam kegiatan Sosialisasi REDD+ ditingkat Kabupaten Sebagai Berikut :

NO	LEMBAGA/SKPD	TOPIK MATERI / JUDUL MAKALAH
1	Balai Taman Nasional Berbak	Permasalahan , strategi dan kegiatan di Taman Nasional Berbak terkait mitigasi perubahan iklim dalam membangun Kesepahaman menuju Pembangunan kawasan ekosistem Berbak dalam skema REDD+
2	Zoological Society of London	Strategi dan Program ZSL terhadap mitigasi perubahan iklim dalam membangun Kesepahaman menuju pembangunan kawasan ekosistem Berbak dalam skema REDD+
3	Komda REDD Prov. Jambi	Keputusan Gubernur No. 352 Tahun 2013 tentang Strategi dan Rencana Aksi REDD+ Provinsi Jambi

4	Dinas Kehutanan Kabupaten Terkait	Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Produksi sebagai upaya Mitigasi perubahan Iklim dalam skema REDD+
5	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Tanjung Jabung Timur	Permasalahan dan Perencanaan strategis pembangunan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Mitigasi perubahan Iklim Kawasan Lindung Gambut dan rencana pengelolaan kawasan Pesisir Pantai Timur menuju skema REDD+
6	PT.Putra Duta Indahwood	Permasalahan, , strategi dan rencana PT.Putra Duta Indahwood terhadap Mitigasi perubahan Iklim serta rencana pengelolaan dan pemanfaatan Sumber daya Hutan secara berkelanjutan menuju skema REDD+
7	Dinas Kehutanan Provinsi	Permasalahan, , strategi dan kegiatan terkait mitigasi iklim di Tahura Tanjung dalam membangun Kesepahaman menuju Pembangunan kawasan ekosistem Berbak dalam skema REDD+
8	PT. Persona Rimba Belantara	Permasalahan, , strategi dan rencana PT. Pesona Rimba Belantara terhadap Mitigasi perubahan Iklim serta rencana pengelolaan dan pemanfaatan Sumber daya Hutan secara berkelanjutan menuju skema REDD+
9	Camat Terkait	Permasalahan Perubahan Iklim dan Usulan Rencana Desa-desa terkait kegiatan REDD+ di Kecamatan terkait
10	KKI-WARSI	PADIATAPA dan REDD+

Bentuk Kegiatan Sosialisasi REDD+ Tingkat Kabupaten

Presentase dan diskusi dilaksanakan secara panel dimana masing-masing presentasi diarahkan pada kegiatan membangun kesepahaman penyelamatan hutan untuk adaptasi terhadap perubahan iklim begi keberlangsungan kehidupan serta rencana strategis dari masing-masing stakeholder yang akan dilaksanakan dalam rangka antisipasi perubahan iklim pembangunan berkelanjutan menuju skema REDD+ wilayah ekosistem Berbak di Provinsi.

Kegiatan diskusi peserta kegiatan sosialisasi berupa klarifikasi dari tema kegiatan yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengamatan terhadap permasalahan lingkungan hidup, potensi sumber daya alam masing-masing wilayah pedesaan dan Kabupaten serta rencana strategis dari masing-masing Dinas dan Instansi Pemerintah dan swasta yang telah disampaikan dalam sosialisasi serta tanggapan dan masukan dari peserta kegiatan sosialisasi REDD+ tingkat Kabupaten dalam rangka antisipasi dampak perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan yang akan diintegrasikan dengan rencana kegiatan pembangunan masing-masing desa, Kecamatan dan

Kabupaten agar supaya dapat dipahami dan diakses oleh lapisan masyarakat yang berada di wilayah ekosistem Berbak sebagai wujud dari kompensasi kegiatan pembangunan yang seimbang antara kawasan hutan dan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan.

Narasumber Kegiatan Sosialisasi REDD+ (FGD/FPIC) Tingkat Kabupaten



Photo.24 Kegiatan Penyampaian Makalah oleh Narasumber Sosialisasi REDD+ dan proses diskusi yang dipandu oleh Narasumber kegiatan di Kabupaten Muaro Jambi.



Photo.25 Kegiatan Penyampaian Makalah oleh Narasumber Sosialisasi REDD+ dan proses diskusi yang dipandu oleh Narasumber kegiatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Catatan Penting Hasil Sosialisasi REDD+ Tingkat Kabupaten

- 1) TNB dan ekosistemnya sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Kuasa perlu dikelola dan dipelihara kelestariannya.
- 2) Taman Nasional Berbak merupakan kawasan konservasi hutan rawa gambut dan hutan rawa air tawar terluas di Asia Tenggara. 57,4% kawasan BERBAK merupakan gambut dengan karakteristik yang khas dan unik, dan telah ditetapkan sebagai Ramsar Site No. 554 yang merupakan bagian dari ekosistem lahan basah dunia.
- 3) Dari luas TNB 162.700 hektare , sekitar 139.000 hektare di antaranya berada di kawasan Tanjung Jabung Timur. Kawasan ini memegang peranan penting untuk menjaga fungsi hidrology, tempat hidup flora dan fauna langka dan spesifik, serta sumber-sumber keberlangsungan kehidupan masyarakat Tanjung Jabung Timur khususnya dan masyarakat global. Bahkan bagi masyarakat, ekosistem BERBAK menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sumber peradaban Melayu Jambi.

- 4) Kondisi kawasan ekosistem BERBAK saat ini semakin memprihatinkan; $\pm 20\%$ dari luas ekosistem BERBAK mengalami kerusakan akibat deforestasi dan degradasi; alih fungsi untuk Perkebunan, HTI, pertanian dan pemukiman, serta akibat dari kebakaran hutan dan lahan gambut.



Photo.26 Peserta kegiatan Sosialisasi REDD+ di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- 5) Dalam menghadapi isu perubahan iklim dan pemanasan global, ekosistem BERBAK memegang peranan penting. Kawasan ekosistem BERBAK dapat menjadi penyumbang terbesar dari pemanasan global dari pelepasan gas karbon yang berasal dari hutan dan rawan gambut yang terbakar, penyumbang terbesar dari kelangkaan sumber air tawar, dan rentan terhadap terjadinya bencana alam (banjir). Disisi lain dapat memberikan kontribusi besar dalam mengurangi

dampak pemanasan global jika fungsi kawasan ekosistem BERBAK dapat dipertahankan atau dipulihkan dari kerusakan.

- 6) Hasil diskusi-diskusi kampung yang telah dilakukan 4 Kecamatan dalam kawasan BERBAK, teridentifikasi dampak dari kerusakan ekosistem BERBAK mulai dirasakan oleh masyarakat, khususnya yang tinggal didalam dan disekitar kawasan. Dampak yang terjadi antara lain berupa makin seringnya terjadi banjir,

makin sulit memperoleh tangkapan ikan, gagal panen, udara makin panas, iklim semakin tidak menentu sehingga menyulitkan untuk bertani dan mencari ikan, serta semakin sulit mencari hasil hutan non



Photo.27 Peserta kegiatan Sosialisasi REDD+ di Kabupaten Muaro Jambi

kayu dan bahan obatan-obatan tradisional. Rusaknya ekosistem BERBAK juga telah meningkatkan konflik manusia dengan satwa liar dari kawasan, seperti babi hutan, monyet dan harimau.

- 7) Untuk mencegah kerusakan lebih lanjut ekosistem BERBAK sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, tempat menompang kehidupan dan sumber peradaban masyarakat Melayu Jambi, tempat bermukimnya flora dan fauna spesifik serta menjadi benteng dari perubahan iklim, perlu dikelola dan dipelihara kelestariannya. Inisiatif-inisiatif yang sudah dilakukan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan kawasan ekosistem BERBAK perlu mendapat apresiasi dari Pemerintah baik dalam bentuk kucuran program-program pemberdayaan masyarakat maupun dalam bentuk pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan sumberdaya manusia, sehingga dapat semakin memotivasi masyarakat.

Rumusan Hasil Kegiatan Sosialisasi REDD+ Tingkat Kabupaten

(Gagasan Yang Berkembang Untuk Pelestarian Ekosistem Berbak Dan Adaptasi Perubahan Iklim Bagi Keberlangsungan Kehidupan)

- 1) Agar upaya pelestarian dan perlindungan kawasan ekosistem BERBAK dapat berjalan dengan baik dan tidak berbenturan dengan masyarakat yang ada didalam dan sekitar kawasan, perlu kejelasan tapal batas. Untuk itu, perlu difasilitasi penataan ulang tapal batas antara masyarakat dengan Balai TNB & BPKH, sehingga masyarakat tidak terus menerus dipersalahkan dan dianggap merambah kawasan TNB.
- 2) Melestarikan hutan, termasuk kawasan BERBAK merupakan tanggungjawab bersama. Supaya pembagian peran dan tanggungjawab dapat berjalan dengan baik, pemangku kepentingan yang khusus mengurus hutan, perlu meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Desa yang ada di sekitar kawasan BERBAK. Resort-resort TNB yang sudah dibangun harus difungsikan dan berkoordinasi dengan pemerintah desa, sehingga konflik TNB dengan masyarakat dapat dihindari.
- 3) Berbagai program yang berkaitan pelestarian dan perlindungan kawasan BERBAK, perlu sosialisasi dimasyarakat agar masyarakat dapat mengetahui tujuan dan manfaatnya. Selain itu agar program yang dijalankan dapat berhasil dan tepat guna perlu ada pendampingan dari pemangku kepentingan, tidak dibiarkan begitu saja.
- 4) Perlu adanya kompensasi bagi masyarakat dalam upaya pelestarian ekosistem BERBAK. Kompensasi dapat dalam bentuk program-program pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dilakukan pendampingan secara intensif.
- 5) Program REDD+ di TN Berbak :
 - a. Sejalan dengan komitmen Pemerintah RI untuk mengurangi emisi GRK sebesar 26% secara sendiri dan 40% dengan dukungan internasional;
 - b. Sejalan dengan 8 kebijakan prioritas Kementerian Kehutanan, khususnya terkait upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

- c. TN Berbak ditunjuk sebagai Site DA REDD+ karena mempunyai potensi stok dan penyerap karbon yang cukup tinggi;
 - d. Program DA REDD+ di kawasan BERBAK, menjadi stimulus dalam memperkuat 3 pilar pengelolaan TN: perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan dan menjawab permasalahan terkait gangguan kawasan, sinergitas program, kapasitas SDM, Sarpras;
 - e. Pelaksanaan Program REDD+ harus dijalankan secara transparan, terutama dalam hal pembagian kompensasi terhadap masyarakat dan pemerintah desa yang konsisten menjaga dan melindungi kawasan BERBAK.
- 6) REDD+ sebagai peluang dalam perbaikan tata kelola hutan, kebijakan, dan kesempatan dalam menyelesaikan permasalahan fundamental (konflik tenurial, tata ruang dan kesejahteraan masyarakat), maupun dalam pelibatan/peranserta masyarakat dan pengembangan kapasitasnya.
 - 7) Tujuan FPIC (PADIATAPA) adalah untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas pelaksanaan program/proyek/kegiatan REDD+ yang mencakup rangkaian kegiatan yang saling terkait;
 - 8) Kegiatan FPIC di ekosistem Berbak dilaksanakan di level desa, kabupaten dan provinsi;
 - 9) Aspirasi masyarakat terkait program REDD+ mensyaratkan adanya:
 - a. Program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal dan pemanfaatan teknologi tepat guna,
 - b. Mencari solusi penanganan konflik antara masyarakat dengan satwa liar
 - c. Penyelesaian tata batas TNB dengan wilayah kelola masyarakat
 - d. Pemanfaatan SDA dengan memperhatikan prinsip-prinsip konservasi
 - e. Program REDD+ harus mampu menjawab masalah deforestasi dan degradasi hutan

10) Perlu dicari berbagai alternatif solusi pemecahan permasalahan terkait keterbatasan SDM dan masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap ekosistem BERBAK.

11) Perlu adanya kesepakatan dan kesepakatan tindak lanjut antara masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pelestarian ekosistem Berbak,



Photo.28 Peserta kegiatan Sosialisasi REDD+ di Kabupaten Muaro Jambi

khususnya di 4 Kecamatan dalam kawasan BERBAK.

12) Ada atau tidak pendanaan REDD+, kita harus tetap menjaga kawasan ekosistem BERBAK sebagai sumber keberlanjutan kehidupan. Kompensasi dari program REDD+ di ekosistem BERBAK hanya menjadi “pelengkap” dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun pelestarian ekosistem BERBAK.

13) Perlu ditinjau ulang perusahaan-perusahaan pemegang IUPHHK atau perkebunan yang aksesnya mendekati TNB yang hanya mementingkan keuntungan semata dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Sementara itu masyarakat dituding sebagai perusak atau perambah hutan.

14) Potensi kerugian REDD+, a.l : mengabaikan hak-hak masyarakat lokal, berebut manfaat sehingga meningkatkan ketidakadilan dan konflik sosial, mengincar praktek pemanfaatan lahan masyarakat lokal dan melarang cara hidup berkelanjutan, dll.

15) Potensi keuntungan REDD+ : memberikan manfaat terhadap perbaikan kebijakan dan tata kelola kehutanan, pengakuan hak-hak masyarakat lokal, mempromosikan status dan kepemilikan penuh wilayah tradisional, dll.

- 16) Nilai penting dari Ekosistem BERBAK yang terdiri dari TNB, Tahura, HL dan HP dalam Inisiatif Karbon Berbak
 - a. Nilai biodiversiti dan jasa lingkungan
 - b. Nilai sosial-budaya dan ekonomi (60 ribu jiwa tergantung dari ekosistem Berbak).
 - c. Tingkat ancaman cukup tinggi terhadap pelepasan emisi karbon

- 17) Kegiatan REDD+ di ekosistem BERBAK harus diiringi dengan kegiatan praktis dalam upaya pelibatan dan peningkatan partisipasi masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan upaya-upaya pelestarian ekosistem Berbak, misalnya reboisasi/rehabilitasi hutan secara partisipatif, dll. Hal ini bisa ditindaklanjuti oleh Ko-Roar Berbak, konsorsium NGO mitra TNB yang akan berkegiatan di ekosistem Berbak.

- 18) Keputusan Gubernur Nomor :352 tahun 2013 tentang Strategi dan Rencana Aksi REDD+ Provinsi Jambi dapat menjadi salah satu landasan hukum untuk implementasi kegiatan program REDD+ di ekosistem BERBAK.

LOKAKARYA REDD+ TINGKAT PROVINSI JAMBI

Lokakarya REDD+ ditingkat Provinsi Jambi diselenggarakan dalam rangka melakukan finalisasi rangkaian kegiatan Sosialisasi REDD+ yang telah dilakukan secara marathon dimulai dari 32 desa disekitar wilayah ekosistem Berbak yang terbagi dalam enam cluster wilayah di 4 kecamatan dalam dua Kabupaten dan kemudian dilanjutkan dengan melakukan kegiatan Sosialisasi REDD+ di tingkat Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur guna penyampaian hasil aspirasi dan pemahaman masyarakat di tingkat desa sekitar ekosistem Berbak serta penyusunan strategi masing-masing Kabupaten dalam menjawab permasalahan masyarakat desa Hutan yang berada di koridor penyangga kawasan Taman Nasional Berbak sebagai bagian dari Komunitas yang terdekat atas keberadaan taman nasional Berbak tersebut.

Kegiatan Lokakarya REDD+ di tingkat Provinsi Jambi dilaksanakan di Hotel Golden Harves pada tanggal, 8 Juli 2013 yang dibuka langsung oleh koordinator Komda REDD Provinsi Jambi Dr. Ridwansyah, SE, M.Si sekaligus sebagai pemateri dalam kegiatan Lokakarya REDD+. Secara umum Pada sambutannya sisampaikan bahwa Provinsi Jambi telah memiliki Komisi Daerah Kegiatan REDD di Provinsi Jambi yang merupakan lembaga resmi dibawah naungan Keputusan Gubernur Provinsi Jambi No.352/KEP.GUB/SETDA-EKBANG&SDA-4.2/2013 dan Didukung oleh pembuatan dokumen Strategidan Rencana Aksi Provinsi yang disusun sebagai panduan pelaksanaan kegiatan REDD+ di Provinsi Jambi.



Photo 29 Pembukaan Kegiatan lokakarya REDD+ tingkat Provinsi Jambi oleh Dr. Ridwansyah, SE, M.Si selaku Koordinator Komda REDD Provinsi Jambi.

Selain itu Dr. Ridwansyah juga menyampaikan terima kasih karena Program Sosialisasi REDD+ ini juga merupakan bagian dari rencana kegiatan Komda REDD di provinsi Jambi yang terselenggara oleh Perkumpulan Gita Buana dengan dukungan Clinton Initiative Carbon yang harus ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan pembangunan masyarakat dalam upaya menghadapi perubahan iklim gunaantisipasi dampak yang ditimbulkan serta proses perlindungan kawasan Taman Nasional Berbak yang telah mendapat pengakuan dari Internasional dalam sertifikat Ramsar serta didukung oleh Surat Peretujuan Dirjend PHKA No : S.171 IV-PJLKKHL/2012 tentang Peretujuan Demonstration Activities Reducing Emission From Deforestation and Degradation (DA-REDD) di Taman Nasional Berbak. Melalui upaya perbaikan ekosistem hutan Gambut di Taman Nasional Berbak secara optimal melalui kegiatan pengamanan kawasan DA REDD+ dari perambahan, pengambilan hasil hutan secara ilegal dan pencegahan kebakaran ekosistem hutan Gambut.

Materi kegiatan Lokakarya REDD+ Tingkat Provinsi

NO	LEMBAGA/SKPD	TOPIK MATERI / JUDUL MAKALAH
1	Koordinator Komda REDD+ Provinsi Jambi	Keputusan Gubernur No : 352 tahun 2013 tentang strategi dan rencana aksi REDD+ di Provinsi Jambi
2	Ketua Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Rencana strategis Pembangunan Kawasan Konservasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menuju Skema REDD+
3	Ketua Bappeda Kabupaten Muaro Jambi	Rencana strategis Pembangunan Kawasan Konservasi di Kabupaten Muaro Jambi menuju Skema REDD+
4	Balai Taman Nasional Berbak	Permasalahan dan strategi kegiatan terkait mitigasi perubahan iklim menuju pembangunan kawasan ekosistem Berbak dalam skema REDD+ di Provinsi Jambi

Bentuk Kegiatan Lokakarya REDD+ Tingkat Provinsi

Kegiatan Lokakarya REDD+ tingkat Provinsi Jambi diawali dengan memaparkan sintesa dan hasil rangkumna kegiatan sosialisasi REDD+ di dua Kabupaten. Perkumpulan Gita Buana sebagai penyelenggara kegiatan Sosialisasi REDD+ (inisiatif Karbon Berbak), dimana hasil sintesa kegiatan masing-masing kabupaten merupakan hasil kesepakatan dan aspirasi yang telah



Photo.30 Pemaparan hasil sintesa dari kegiatan FGD-FPIC tingkat Kabupaten Oleh Perkumpulan Gita Buana

dirangkum pada dua kabupaten merupakan bahan yang akan di perbaiki dan disempurnakan ditingkat Provinsi guna mendapatkan dukungan dan legalitas dari pemangku kepentingan di kawasan ekosistem berbak sebagai kerangka dasar untuk rencana tindak lanjut kegiatan pembangunan konservasi di kawasan ekosistem Berbak.

Pelaksanaan Lokakarya REDD+ Provinsi Jambi dilaksanakan hampir sama dengan pelaksanaan Sosialisasi di Tingkat Kabupaten. Antara lain melalui Presentasi makalah dari Narasumber serta dilanjutkan dengan diskusi Panel guna membentuk kesepahaman bagi audien yang ada. Pada kegiatan ini diharapkan lebih banyak masukan-masukan dari pemangku kepentingan yang berkegiatan dan melakukan aktivitas di kawasan ekosistem Berbak dalam rangka penyempurnaan catatan penting terkait aspirasi masyarakat dan usulan-usulan kegiatan serta rencana

Presentase dan diskusi dilaksanakan secara panel Materi oleh Komda REDD Provinsi Jambi diarahkan pada kegiatan membangun kesepahaman penyelamatan hutan untuk adaptasi terhadap perubahan iklim begi keberlangsungan kehidupan serta rencana strategis dari masing-masing stakeholder yang akan dilaksanakan dalam rangkaantisipasi perubahan iklim pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan kebijakan kesejahteraan rendah karbon menuju skema REDD+ wilayah ekosistem Berbak di Provinsi.

Sedangkan REDD+ adalah pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, termasuk di dalamnya juga peran konservasi dan keanekaragaman hayati, pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan cadangan karbon hutan. REDD+ penting untuk dikembangkan dalam kerangka pertumbuhan rendah karbon (*low carbon economic growth*) dan/atau ekonomi

hijau (*green economy*) guna memastikan bahwa upaya penanganan perubahan iklim dari sektor penggunaan lahan dilakukan sejalan dengan kebijakan dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan Indonesia.

Pendekatan kebijakan “*kesejahteraan rendah karbon*” bagi Provinsi Jambi adalah respon terbaik untuk menjawab pertanyaan kritis dan dilematis tersebut diatas. Hal ini sekaligus meluruskan pemikiran, bahwa program pengurangan emisi karbon tidak harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini tidak harus terjadi, karena pada kenyataannya, skema untuk menurunkan



Photo.31 Pemaparan Keputusan Gubernur No : 352 tahun 2013 tentang strategi dan rencana aksi REDD+ di Provinsi Jambi Oleh Koordinator Komda REDD Provinsi Jambi.

emisi dari deforestasi dan degradasi hutan yang dimandatkan dalam Konferensi Perubahan Iklim Bali pada tahun 2007 dapat membawa ke jalur pembangunan yang benar dan lebih berkelanjutan, dan peluang-peluang untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Jambi. Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ merupakan bagian menyiapkan serangkaian tindakan untuk mewujudkan kebijakan “*kesejahteraan rendah karbon*” . Tantangannya adalah bagaimana penerapan kebijakan “*kesejahteraan rendah karbon*” dapat dijalankan dengan SRAP REDD+ sebagai salah instrumen kebijakan operasionalnya bagi semua khalangan.

Rencana Aksi Mitigasi dari Program REDD di Provinsi Jambi diarahkan pada Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); Perencanaan pemanfaatan dan peningkatan usaha kawasan hutan; Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan; Penguatan kawasan hutan; Peningkatan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa (termasuk lahan bergambut); Pengelolaan lahan gambut untuk pertanian berkelanjutan; Pengembangan pengelolaan lahan pertanian di lahan gambut terlanjar dan terdegradasi untuk mendukung sub-sektor perkebunan, peternakan dan hortikultura; Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, dan reklamasi hutan di DAS prioritas; Pengembangan perhutanan sosial; Pengendalian kebakaran hutan; Penyidikan dan pengamanan hutan; Pengembangan kawasan konservasi, ekosistem esensial dan pembinaan hutan lindung; Peningkatan usaha hutan tanaman. Yang harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk juga NGO lingkungan yang merupakan partner pemerintah dalam pembangunan.

Materi berikutnya disampaikan oleh Balai Taman Nasional Berbak merupakan rangkaian kegiatan merupakan turunan rencana strategis dari Kementerian Kehutanan tahun 2010-2014 yang tertuang dalam Permenhut no. 20/Menhut-II.tahun 2012 Bab.II pasal.2 yaitu ; Maksud penyelenggaraan karbon adalah pengaturan prinsip dasar dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan karbon hutan. Dan Tujuan penyelenggaraan karbon hutan adalah untuk mewujudkan optimalisasi penyelenggaraan karbon hutan dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan lestari menuju masyarakat sejahtera secara berkeadilan.



Photo.32 Pemaparan Permasalahan dan strategi kegiatan terkait mitigasi perubahan iklim menuju pembangunan kawasan ekosistem Berbak dalam skema REDD+ Oleh Balai Taman Nasional Berbak.

Selain itu pada BAB III Pasal III : Kegiatan REDD antaralain dilakukan dalam bentuk; Pembibitan, penanaman, pemeliharaan hutan dan lahan dan pemanenan hutan yang menerapkan prinsip pengelolaan lestari. Perpanjangan siklus tebangan pada dan/atau penanaman pengayaan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Perlindungan, pengamanan pada areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Perlindungan keanekaragaman hayati. Pengelolaan hutan lindung lestari. Pengelolaan hutan konservasi. Terkit dengan Program DA REDD+, Disisi lain Balai Taman Nasional Berbak telah melaksanakan program antara lain : Meningkatkan kapasitas hutan dalam penyerapan dan penyimpanan karbon Melalui kegiatan Reboisasi dan Restorasi, Upaya Mempertahankan stok carbon melalui pencegahan dan penanggulangan kegiatan Illegal Logging, Perambahan kawasan hutan, pencagahan kebakaran hutan dan mempertahankan tinggi permukaan air tanah di lahan Gambut. Serta program Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan pembuatan kebn Bibit desa dan bantuan peningkatan usaha ekonomi masyarakat dalam rangka menyiapkan model desa Konservasi.

Materi yang disampaikan oleh Bappeda Kabupaten Muaro Jambi Rencana strategis Pembangunan Kawasan Konservasi di Kabupaten Muaro Jambi menuju Skema REDD+ pada umumnya masih mengacu pada visi dan misi pembangunan Kabupaten masing-masing. Antara Lain Dalam Menata zonasi dan perlindungan terhadap kawasan



Photo.33 Pemaparan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi oleh Sekretaris Bappeda Kab. Muaro Jambi

konservasi, peningkalan budaya situs dan pengembangan budaya tradisional. Adapun strategi pembangunan terdapat empat kebijakan antara lain : a. Penyampaian informasi dan pemberian pemahaman para pihak tentang pentingnya perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi, peninggalan situs dan pengembangan budaya tradisional. b. Fasilitasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. c. Memotivasi Masyarakat untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. d. Menindak setiap pelaku yang merusak daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Selain itu rencana kegiatan pembangunan daerah diarahkan untuk meningkatkan peran pemangku kepentingan dalam menangani masalah yang berkaitan dengan kawasan hutan di masing-masing Kabupaten, antara lain : Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap fungsi kawasan hutan, Kondisi dan tanda batas pada kawasan hutan yang belum jelas di lapangan, sehingga menyulitkan dalam menentukan letak pasti batas kawasan hutan di lapangan, Perlu adanya rekonstruksi / pemeliharaan kembali tapal batas kawasan hutan dengan melibatkan masyarakat setempat, Masih adanya perambahan terhadap kawasan hutan (okupasi oleh masyarakat) Kebakaran hutan pada kawasan hutan dan lahan, Masih terjadinya kegiatan illegal logging dan illegal trading pada kawasan hutan, yang perlu penanganan serius serta diharapkan dukungan dan kerjasama dengan pihak luar.

Kegiatan diskusi peserta kegiatan sosialisasi berupa klarifikasi dari tema kegiatan yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengamatan terhadap permasalahan lingkungan hidup, potensi sumber daya alam masing-masing wilayah pedesaan dan Kabupaten serta rencana strategis



Photo.34 Proses Kegiatan dalam Bentuk Pemaparan oleh Narasumber dan dilanjutkan dengan diskusi umpan balik oleh peserta Lokakarya

dari masing-masing Dinas dan Instansi Pemerintah dan swasta yang telah disampaikan dalam sosialisasi serta tanggapan dan masukan dari peserta kegiatan sosialisasi REDD+ tingkat Kabupaten dalam rangkaantisipasi dampak perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan yang akan diintegrasikan dengan rencana kegiatan pembangunan masing-masing desa, Kecamatan dan Kabupaten agar supaya dapat dipahami dan diakses oleh lapisan masyarakat yang berada di wilayah ekosistem

Berbak sebagai wujud dari kompensasi kegiatan pembangunan yang seimbang antara kawasan hutan dan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan.

Secara umum tanggapan peserta Lokakarya banyak membahas permasalahan konflik perbatasan antara Taman Nasional Berbak dengan lahan pertanian masyarakat terkait pal batas dan dampak keberadaan Taman Nasional Berbak bagi peningkatan perekonomian masyarakat berkaitan dengan upaya masyarakat sekitar kawasan dalam



Photo.35 Proses Kegiatan dalam Bentuk Pemaparan oleh Narasumber dan dilanjutkan dengan diskusi umpan balik oleh peserta Lokakarya

upaya menjaga kelestarian Taman Nasional. Selain itu pembahasan juga ditujukan kepada instansi pemerintah yang berkepentingan dalam kegiatan pembangunan kema-syarakat di sekitar dengan rencana strategis bagi keberlangsungan pembangunan kemasyarakatan dan peran-peran penting instansi pemerintah dalam pembangu-nan wilayah di dua Kabupaten.

Latar Belakang

1. Taman Nasional Berbak merupakan kawasan konservasi hutan rawa gambut dan hutan rawa air tawar terluas di Asia Tenggara. 57,4% kawasan BERBAK merupakan gambut dengan karakteristik yang khas dan unik, dan telah ditetapkan sebagai Ramsar Site No. 554 yang merupakan bagian dari ekosistem lahan basah dunia;
2. Kawasan TNB dengan 162.700 hektar, memegang peranan penting untuk menjaga fungsi hidrology, tempat hidup flora dan fauna langka dan spesifik, dan sumber-sumber keberlangsungan kehidupan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan. Bahkan bagi masyarakat, ekosistem BERBAK menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sumber peradaban Melayu Jambi.
3. Sebagai kawasan penting, kondisi ekosistem BERBAK saat ini semakin memprihatinkan. $\pm 20\%$ dari luas ekosistem BERBAK mengalami kerusakan akibat deforestasi dan degradasi, seperti; alih fungsi untuk Perkebunan, HTI, pertanian dan pemukiman, serta akibat dari kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi hampir sepanjang tahun pada saat musim kemarau.
4. Dalam menghadapi isu perubahan iklim dan pemanasan global, ekosistem BERBAK memegang peranan penting. Jika kawasan ini tidak dikelola dengan prinsip-prinsip pembangunan rendah karbon, maka dapat menjadi penyumbang terbesar terhadap peningkatan Gas Rumah Kaca (GRK), penyumbang terbesar dari kelangkaan sumber air tawar, hilangnya flora dan fauna spesifik kawasan, dan rentan terhadap terjadinya bencana alam (banjir). Namun, jika dikelola dengan baik, dapat memberikan kontribusi besar dalam mengurangi dampak pemanasan global, pengurangan emisi karbon, terpeliharanya flora dan fauna spesifik kawasan, terlindunginya sumber-sumber kehidupan masyarakat, termasuk sumber peradaban Melayu Jambi yang berada dalam kawasan ekosistem BERBAK.
5. Hasil diskusi kampung dan sosialisasi tingkat Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur yang telah dilakukan Perkumpulan GITA BUANA, teridentifikasi dampak dari kerusakan ekosistem BERBAK mulai dirasakan oleh masyarakat, khususnya yang tinggal didalam dan disekitar kawasan. Dampak yang terjadi antara lain berupa makin seringnya terjadi banjir, makin sulit memperoleh tangkapan ikan, gagal panen, udara makin panas, iklim semakin tidak menentu sehingga menyulitkan untuk bertani dan mencari ikan. Masyarakat semakin sulit mencari hasil hutan non kayu dan bahan obatan-obatan tradisional, meningkatnya serangan hama babi hutan dan monyet terhadap pertanian. Rusaknya ekosistem BERBAK juga telah meningkatkan konflik manusia dengan harimau.

6. Karenanya, dari hasil diskusi kampung dan sosialisasi Kabupaten yang memiliki kawasan ekosistem BERBAK, dihasilkan komitmen dan kesadaran bersama untuk menyelamatkan hutan dan lahan gambut di ekosistem BERBAK sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa bagi keberlangsungan kehidupan.
7. Untuk melakukannya, diperlukan kerjasama yang sinergis, antara pemerintah, swasta, masyarakat dan pemangku kepentingannya lainnya. Inisiatif-inisiatif yang sudah dilakukan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan kawasan ekosistem BERBAK perlu mendapat apresiasi dari Pemerintah dan dunia Internasional dalam bentuk kucuran program-program pemberdayaan masyarakat, pelatihan dan pendampingan peningkatan sumberdaya manusia, sehingga masyarakat di dalam dan sekitar kawasan dapat hidup sejahtera dan tetap menjaga kelestarian kawasan ekosistem Berbak.

Langkah Strategis dalam Menyelamatan Kawasan Ekosistem Berbak

1. Pemetaan kawasan kelola masyarakat didalam dan sekitar kawasan secara partisipatif. Masalah mendasar dan yang dapat memicu terjadinya konflik yang perlu segera diselesaikan oleh pemerintah adalah kejelasan **tapal batas** hak kelola masyarakat didalam dan sekitar kawasan. Pemerintah harus dapat memediasi masyarakat dengan pengelola BTNB dan BPKH maupun dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kawasan.
2. Pelestarian kawasan BERBAK merupakan tanggungjawab bersama. Oleh karena itu, pembagian peran dan tanggungjawab diantara 3 (tiga) pilar, yaitu; Pemerintah dengan unsur terkaitnya, swasta dan masyarakat. Pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas akan memudahkan untuk koordinasi, bersinergi dan saling menguatkan, bukan saling menyalahkan seperti yang terjadi selama ini.
3. Nilai penting dari Ekosistem BERBAK yang terdiri dari TNB, Tahura, Hutan Lindung dan Hutan Produksi dalam Inisiatif Karbon Berbak
 - Nilai biodiversiti dan jasa lingkungan
 - Nilai sosial-budaya dan ekonomi; lebih dari 60 ribu jiwa dengan sumber-sumber peradaban masyarakat Melayu Jambi ada disekitar kawasan BERBAK
 - Memiliki nilai keanekaragaman hayati dan cadangan karbon tinggi yang berkontribusi langsung terhadap keseimbangan ekosistem dan ekologi global.
4. Untuk menjaga dan melindungi nilai penting ekosistem BERBAK, perlu adanya kompensasi bagi Perangkat desa dan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan. Kompensasi dapat dalam bentuk program-program pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dilakukan pendampingan secara intensif.

5. Informasi adanya skema pendanaan REDD+ untuk pemberdayaan masyarakat didalam dan sekitar kawasan BERBAK dapat menjadi peluang. Tetapi bukan menjadi **tujuan**. Ada atau tidak pendanaan REDD+, kita harus tetap menjaga kawasan ekosistem BERBAK sebagai sumber keberlanjutan kehidupan.
6. Jika skema pendanaan REDD+, dijadikan peluang perlu dilakukan secara transparan, jujur, bertanggungjawab dan partisipatif atau melalui prinsip-prinsip FPIC atau PADIATAPA agar tidak menjadi **bumerang** bagi masyarakat. Sebab, skema REDD+ memiliki 2 (dua) potensi, yaitu :
 - (1) Potensi kerugian, seperti; mengabaikan hak-hak masyarakat lokal, berebut manfaat sehingga meningkatkan ketidakadilan dan konflik sosial, mengincar praktek pemanfaatan lahan masyarakat lokal dan melarang cara hidup berkelanjutan.
 - (2) Potensi keuntungan, seperti; memberikan manfaat terhadap perbaikan kebijakan dan tata kelola kehutanan, pengakuan hak-hak masyarakat lokal, mempromosikan status dan kepemilikan penuh wilayah tradisional.
7. Keputusan Gubernur Nomor :352 tahun 2013 tentang Strategi dan Rencana Aksi REDD+ Provinsi Jambi dapat menjadi salah satu landasan hukum untuk implementasi kegiatan program REDD+ di ekosistem BERBAK.
8. Pemerintah (Pusat dan Daerah) harus berani meninjau ulang izin perusahaan-perusahaan pemegang IUPHHK atau perkebunan yang aksesnya mendekati TNB. Sebab selama ini, keberadaan perusahaan hanya mementingkan keuntungan semata, tidak memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya dan bahkan cenderung merusak kelestarian kawasan ekosistem BERBAK.
9. Perkumpulan GITA BUANA, ZSL, Balai TNB dan Organisasi masyarakat sipil lainnya berusaha mendukung, mengembangkan dan mempromosikan inisiatif masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan sumber-sumber kehidupan dan sumberdaya alam di kawasan ekosistem BERBAK secara berkelanjutan.
10. Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten) wajib mendukung baik dalam bentuk kebijakan, maupun pendanaan dan perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber kehidupan dan sumberdaya alam di kawasan ekosistem BERBAK secara berkelanjutan

Kesimpulan

Kegiatan Sosialisasi REDD+ Inisiatif Karbon Berbak merupakan inisiatif awal dari kesepakatan antara Perkumpulan Gita Buana dengan Clinton Climate Initiative (CCI), di kawasan Ekosistem Berbak yang dilatari dengan adanya permasalahan bersama bagi pemangku kepentingan dalam melastarikan kawasan ekosistem Berbak sebagai koridor penyangga keberlanjutan kawasan Taman Nasional Berbak serta keberpihakan terhadap permasalahan sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Ekosistem Berbak untuk jangka panjang serta antisipasi dari degradasi dan dampak perubahan iklim global yang ditimbulkan akibat proses-proses yang tidak bertanggung jawab atas pelestarian kawasan Taman Nasional Berbak.

Berdasarkan tujuan awal kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan oleh Perkumpulan Gita Buana selama enam bulan pelaksanaan kegiatan sosialisasi REDD+ (Inisiatif Karbon berbak) merupakan penjabaran dari strategi Nasional dan rencana aksi dari pengelolaan lahan basah di Indonesia serta bagian dari Strategi Rencana Aksi Provinsi Jambi dalam pelestarian Lingkungan hidup secara umum di kawasan lahan basah Pantai Timur Provinsi Jambi dengan pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk : 1. Memberikan informasi kepada berbagai pihak di daerah terkait dengan perubahan iklim dan skema REDD+, 2. Mengumpulkan aspirasi dari berbagai pihak di daerah dan mengidentifikasi pada tahap awal peluang, hambatan dan kebutuhan untuk mendorong inisiatif baru terkait dengan skema REDD+, 3. Memberikan informasi awal terkait kegiatan inisiatif mitigasi perubahan iklim yang sudah dilaksanakan oleh Perkumpulan Gita Buana, lembaga ZSL yang bekerjasama dengan Balai Taman Nasional Berbak untuk persiapan program percontohan REDD+, dan 4. Membangun rencana tindak lanjut bersama yang disepakati di tingkat daerah dengan melibatkan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Secara umum pelaksanaan kegiatan didapati kesimpulan antara lain:

1. Pada pra pelaksanaan kegiatan dalam bentuk persiapan agenda kegiatan dilapangan, Perkumpulan Gita Buana telah mendapatkan dukungan besar serta komitmen bersama dari pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kegiatan di kawasan Taman nasional Berbak antara lain Balai Taman Nasional Berbak, ZSL Program di wilayah Jambi, KKI Warsi dan Pemerintah daerah mulai dari 32 desa, 4 Kecamatan, 2 Kabupaten dan Provinsi Jambi serta SKPD yang terkait dalam kegiatan Konservasi di Taman Nasional Berbak, serta dukungan penuh dalam implementasi kegiatan yang berjalan dengan baik

dan keseriusan dalam pemahaman situasi, kondisi dan permasalahan bersama guna memberikan penyadaran bagi lapisan masyarakat di sekitar wilayah ekosistem Berbak.

2. Dukungan keseriusan dalam kesediaan untuk bermusyawarah guna menyiapkan berbagai materi terkait kegiatan sosialisasi REDD+ (Inisiatif Karbon Berbak) serta proses diskusi bersama dengan Perkumpulan Gita Buana untuk melengkapi dokumen terkait dengan materi yang akan disampaikan pada masyarakat serta perdebatan dalam penyederhanaan bahasa yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan kebutuhan materi lainnya guna mensukseskan kegiatan sosialisasi REDD+ di kawasan Ekosistem Berbak.
3. Secara umum rangkaian kegiatan sosialisasi REDD+ yang dilaksanakan telah sesuai dengan perencanaan dan tujuan awal dari kegiatan dimana pesan-pesan yang disampaikan kepada semua stakeholder telah mendapatkan respon positif bagi semua kalangan dan telah terakumulasi permasalahan-permasalahan berkaitan dengan Degradasi serta dampak-dampak dari perubahan iklim secara global di masing-masing desa dan wilayah Kabupaten. Potensi wilayah dan potensi sumber daya alam serta sumber daya manusia di wilayah ekosistem berbak serta aspirasi masyarakat secara umum berkaitan dalamantisipasi dari dampak perubahan iklim secara swadaya maupun perlu penanganan lebih lanjut oleh pemangku kepentingan yang berkegiatan di wilayah tersebut serta rencana tindak lanjut dari masyarakat yang akan disinkronisasikan dengan rencana strategis dari Pemerintah daerah baik Kabupaten maupun Provinsi dan lembaga-lembaga lainnya yang berkepentingan melakukan kegiatan di wilayah ekosistem Berbak. (Dokumen terkait terlampir)
4. Dari rangkaian kegiatan Sosialisasi yang diselenggarakan secara marathon di wilayah ekosistem berbak secara umum telah memberikan harapan kepada semua lapisan masyarakat maupun pemerintah daerah sebagai langkah awal bersama yang terintegrasi dari proses penyelamatan lingkungan dan gambaran utuh dari permasalahan yang terjadi untuk dapat ditindaklanjuti menjadi rencana aksi baik dari Perkumpulan Gita Buana, lembaga-lembaga swasta lainnya serta institusi pemerintah daerah untuk menjabarkan menjadi rencana aksi yang strategis dalam rangka penyelamatan kawasan ekosistem Berbak secara umum dan upaya peningkatan ekonomi masyarakat hutan yang hidup di sekitar kawasan ekosistem berbak serta pencarian upaya-upaya pemangku kepentingan dan Perkumpulan Gita Buana dalam mencari solusi, upaya-upaya positif dalam menggali potensi sumber daya alam sebagai salah satu langkah strategis dalam implementasi kegiatan yang ramah lingkungan sebagai sumber-sumber mata pencaharian masyarakat tanpa melakukan kegiatan ilegal dan proses penyelamatan kawasan ekosistem berbak secara partisipatif.

5. Secara umum Pemerintah daerah mulai dari pemerintahan desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi telah mendukung dan memberikan apresiasi kegiatan sosialisasi REDD+ (inisiatif Karbon Berbak) dan berharap agar upaya-upaya positif yang telah terlaksana bukan hanya sekedar mendapatkan dokumen kegiatan sebagai bahan laporan ke lembaga donor saja dan dibutuhkan upaya tindak lanjut agar supaya permasalahan yang terjadi ditingkat lapangan dapat terminimalisir dengan memperhatikan hajat hidup masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan ekosistem berbak sebagai bagian penting yang harus dicarikan alternatif kegiatan pembangunan guna penyelamatan kawasan ekosistem berbak dan Taman Nasional berbak secara berkelanjutan dan dilaksanakan secara partisipatif bersama masyarakat sesuai dengan tujuan FPIC (Free Prior and informed Consent) sebagai prinsip dan pendekatan dalam pengembangan kebijakan dan proyek di wilayah ekosistem berbak.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Sebagai upaya tindak lanjut dan rencana kegiatan Sosialisasi REDD+ (inisiatif Karbon Berbak) di 32 Desa wilayah ekosistem Berbak dengan melihat kondisi dan permasalahan yang ada di wilayah tersebut serta pertimbangan hasil aspirasi yang telah tergalikan dalam kegiatan sosialisasi REDD+ ditingkat lapangan maka beberapa alternatif yang di ajukan kepada Clinton Climate Initiative (CCI), sebagai lembaga donor yang mendanai kegiatan awal, perkumpulan Gita Buana merencanakan kegiatan tindak lanjut kegiatan untuk dapat di implementasikan ditingkat lapangan sebagai berikut :

1. Untuk pemahaman lebih lanjut dalam melakukan potret desa sasaran maka direncanakan akan dilaksanakan kegiatan Pemetaan Sosial Ekonomi Masyarakat secara partisipatif melalui kegiatan Fokus Group Diskusi secara terintegrasi dengan melibatkan multistakeholder dan pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan SKPD terkait di Kabupaten dalam rangka penyusunan naskah akademis rancangan pembangunan desa kawasan secara terpadu melalui kaidah Konservasi dan penyelamatan lingkungan hidup guna antisipasi perubahan iklim dan mitigasi dan mengurangi tekanan masyarakat terhadap kawasan hutan dan penyelamatan ekosistem berbak secara partisipatif .
2. Melakukan rangkaian kegiatan pemetaan kawasan desa, kawasan Konservasi kawasan hutan dan kawasan konservasi mangrove desa guna penyusunan rencana tata ruang kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan kegiatan konservasi secara partisipatif bersama masyarakat dengan perimbangan rencana strategis pembangunan kawasan oleh Pemerintah Kabupaten terkait guna mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan pendampingan dengan rencana strategis Kabupaten terkait serta pembagian peran bersama dalam pembangunan kemasyarakatan.

3. Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia di 32 desa sasaran, yang ditujukan untuk mempersiapkan kelompok masyarakat dan generasi muda desa dalam melakukan kegiatan konservasi jangka panjang, maka rencana kerja selanjutnya adalah menyiapkan generasi konservasi yang akan menggiatkan kegiatan pembangunan sekaligus sebagai tenaga penggerak (Motivator) kegiatan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dengan menggunakan kaidah konservasi di tingkat desa dalam bentuk pelatihan-pelatihan dan pembinaan masyarakat dampingan dengan pengetahuan Konservasi secara umum, pengetahuan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan pemahaman tentang keanekaragaman hayati yang ada di tingkat desa dan pengembangan serta pengelolaan secara berkelanjutan sebagai salah satu alternatif peluang usaha guna meningkatkan pendapatan masyarakat desa hutan dan mengurangi tekanan terhadap keberadaan Taman Nasional berbak dan kawasan konservasi mangrove di wilayah desa dampingan.
4. Melakukan kampanye penyelamatan hutan bersama masyarakat dan instansi pemerintah terkait di wilayah ekosistem Berbak dalam rangka memberikan penyadaran dan pemahaman akan arti pentingnya kawasan ekosistem berbak sebagai kawasan penyangga Taman Nasional Berbak sebagai kawasan yang dilindungi berdasarkan sertifikat Ramsar tahun 1991, dan kawasan Konservasi mangrove sebagai salah satu benteng alam berdasarkan fungsi dan manfaat secara ekologi antara lain sebagai pelindung Garis Pantai dari ancaman abrasi dan intrupsi air laut, tempat mencari makan (feeding ground), tempat asuhan dan pembesaran (nursery ground), tempat Pemijahan (spawning ground) bagi aneka biota perairan dan pengatur iklim mikro penyerap karbon terbesar gunaantisipasi ancaman climate change di wilayah ekosistem Berbak. Sedangkan fungsi ekonomi bagi kemasyarakatan antara lain sebagai sarana penghasil kepeluan rumah tangga, industri rumah tangga dan pengasil sumber ekonom lainnya yang menunjang pendapatan masyarakat secara langsung.
5. Melakukan kordinasi terpadu dengan pihak pemerintah daerah setempat terkait dengan program pembagunan bagi masyarakat dan kawasan ekosistem Berbak guna mewujudkan rencana kerja pembangunan desa yang tertuang dalam RPJM-Desa dan rencana pembangunan wilayah sesuai dengan rencana kerja pembangunan di 2 Kabupaten (RPJM-Kabupaten) Secara terintegrasi bagi masyarakat sekitar kawasan ekosistem berbak. Sesuai dengan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam rangkuman hasil kegiatan sosialisasi REDD+ Inisiatif Karbon Berbak dan sintesa kegiatan mulai dari tingkat desa kecamatan, Tingkat Kabupaten dan Tingkt Provinsi Jambi (dokumen Terlampir)

Kegiatan Sosialisasi REDD+ Inisiatif Karbon berbak yang telah terselenggara merupakan bagian dari rencana kegiatan Perkumpulan Gita Buana dalam rangka mewujudkan visi dan misi kelembagaan dan sebagai salah satu upaya pelaksanaan kegiatan pendampingan kemasyarakatan dan pembangunan masyarakat hutan di wilayah pedesaan dan wilayah pesisir. Sejalan dengan tujuan perkumpulan Gita Buana antara lain : 1. Memberdayakan masyarakat rentan dengan mengembangkan potensi ekonomi, sosial budaya, dan politik guna meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup ke tingkat yang lebih baik; 2. Menimbulkan kesadaran masyarakat untuk secara aktif memelihara dan memanfaatkan kelestarian alam dan keanekaragaman hayati serta mencari alternatif guna mendorong terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan dan lestari.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, kegiatan Sosialisasi REDD+ (Inisiatif Karbon Berbak) Membangun kesepahaman penyelamatah hutan untuk adaptasi terhadap perubahan Iklim bagi keberlangsungan kehidupan melalui skema REDD+ di Tingkat Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung jabung Timur dan Provinsi Jambi merupakan keberlanjutan program kerja Perkumpulan Gita Buana yang telah dimulai pada tahun 2000 yang diawali dengan kegiatan survey dan Desain Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pariwisata Burung Migran dan dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan Masyarakat Pesisir pantai Timur kawaan ekosistem Berbak dalam program Mengurangi Dampak Negatif dan Pemulihan Produktivitas Pemanfaatan Lahan Basah oleh Masyarakat Lokal di Kawasan Penyangga Taman Nasional Berbak, serta kegiatan Penyelamatan ekosistem Lahan Basah Pesisir Berbak Berbasis Masyarakat Lokal Penyangga Taman Nasional Berbak sebagai salah satu taman nasional yang telah diakui keberadaanya berdasarkan sertifikat Ramsar tahun 1991.

Diharapkan Rumusan hasil sintesa kegiatan yang telah dilaksanakan secara marathon dimulai dari pelaksanaan kegiatan di 32 desa 4 kecamatan dan 2 kabupaten dan Tingkat Provinsi Jambi diyakini akan dapat menjadi pembelajaran yang spesifik dan dapat menyajikan kontek permasalahan, potensi sumber daya alam serta rencana strategis dari multistakeholder dalam Pelestarian Ekosistem Berbak Dan Adaptasi Perubahan Iklim Bagi Keberlangsungan Kehidupan yang harus mendapat perhatian bagi semua khalangan guna keberlanjutan program kegiatan untukantisipasi dampak

negatif yang ditimbulkan baik internal maupun eksternal di tingkat masyarakat secara umum.

DOKUMENTASI KEGIATAN LOKAKARYA REDD+ TINGKAT PROVINSI JAMBI



Photo... Pembukaan kegiatan lokakarya REDD+ Inisiatif Karbon Berbak di Hotel Golden Harvest Jambi pada tanggal, 8 Juli 2013.



Photo... Pembukaan Kegiatan Lokakarya REDD+ Tingkat Provinsi Jambi yang dibuka oleh Koordinator Komda REDD Provinsi Jambi, Dr. Ridwansyah.



Photo... Peserta kegiatan lokakarya REDD+ Inisiatif Karbon Berbak di Hotel Golden Harvest Jambi pada tanggal, 8 Juli 2013. Terdiri dari Tokoh Masyarakat dan Perangkat desa di 32 desa, Camat dan Sekretaris Camat di 4 Kecamatan, unsur Pemerintah Kabupaten dan Kepala Dinas (SKPD) terkait dengan kegiatan, serta NGO lokal.

